

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep manajemen laba dapat dimulai dari pendekatan teori agensi (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen (*agent*) dengan investor (*principal*). Pandangan *agency theory* yakni adanya pemisahan antara pihak *principal* dan *agent* yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Maksud dengan *principal* dalam teori keagenan ini yakni pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sedangkan *agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya.

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Sedangkan pihak *agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Ditambah lagi *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja,

Konflik kepentingan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham akan mengakibatkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan dapat diminimalkan dengan suatu mekanisme pengawasan yang dapat mensejajarkan kepentingan yang terkait tersebut. Pemegang saham akan berusaha menjaga agar pihak manajemen tidak terlalu banyak memegang kas karena kas yang banyak akan merangsang pihak manajemen untuk menikmati kas tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri (Endriati dkk, 2015).

Teori akuntansi positif merupakan teori yang mencoba untuk membuat prediksi yang bagus dari kejadian dunia nyata. Teori akuntansi positif berkaitan dengan memprediksi tindakan seperti pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon manajer tersebut terhadap standar akuntansi baru yang diusulkan (Scott, 2003 dalam Negara dan Suputra: 2017).

Menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam Negara dan Suputra (2017) Teori akuntansi positif yaitu berusaha untuk menjelaskan fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa. Maksudnya, teori akuntansi positif dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah.

Sealin itu, Watt dan Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2014) juga mengaitkan *Positive accounting theory* dengan fenomena perilaku *oportunistik* manajer dengan membentuk tiga hipotesis yang melatarbelakangi perilaku oportunistik manajer tersebut, yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Konsep ini membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik, tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang memberikan bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap tahun.

2. *Debt (Equity) Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang, maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang. Pada perusahaan yang mempunyai *debt to equity* tinggi, manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio *debt to equity* yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur, bahkan perusahaan terancam melanggar perjanjian utang.

3. *Political Cost Hypothesis*

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri strategi cenderung untuk menurunkan laba, dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Salah satu regulasi yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. UU mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi inilah yang merangsang manajer untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi.

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Defenisi Manajemen Laba

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan

keuangan untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu (Healy dan Wahlen, 1999 dalam Sulistyanto : 2014).

Yulianti (2005) dalam Amanda dan Febrianti (2015) membagi manajemen laba dalam dua defenisi yaitu:

1. Defenisi sempit manajemen laba, dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Manajemen laba dalam arti sempit ini didefenisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accrual* dalam menentukan besarnya laba.
2. Defenisi luas manajemen laba, merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang.

Alasan tindakan manajemen laba biasanya diterapkan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer. Manajemen laba berkaitan erat dengan perolehan laba atau prestasi usaha dalam suatu perusahaan, karena seorang manajer dianggap berhasil jika tingkat perolehan laba yang diperoleh berhasil, dan biasanya manajer akan diberikan bonus-bonus akan hal tersebut (Endriati dkk, 2015).

Menurut Mulford dan Comiskey (2010: 115) manajemen laba yang baik adalah yang masih di dalam batasan GAAP dan di ungkapkan secara penuh mengenai akibatnya terhadap kinerja keuangan berjalan dan yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Manajemen laba yang buruk adalah manajemen laba yang menyajikan kinerja keuangan yang menyesatkan pembacanya.

2.1.3.2 Motivasi Melakukan Manajemen Laba

Manajemen laba didorong oleh beberapa motivasi. Scott dalam Astutik dan Mildawati (2016) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba, yaitu :

1. Motivasi Bonus (*Bonus Purpose*).

Perusahaan berusaha memacu dan meningkatkan kinerja karyawan (dalam hal ini manajemen) dengan cara menetapkan kebijakan pemberian bonus setelah mencapai target yang ditetapkan. Sering kali laba dijadikan sebagai indikator dalam menilai prestasi manajemen dengan cara menetapkan tingkat laba yang harus dicapai dalam periode tertentu. Oleh karena itu, manajemen berusaha mengatur laba yang dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Kontraktual Lainnya (*Other Contractual Motivation*).

Manajer memiliki dorongan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memenuhi kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang yang harus dipenuhi karena bila tidak perusahaan akan terkena sanksi. Oleh karena itu, manajer melakukan manajemen laba untuk memenuhi perjanjian hutangnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Motivasi Politik (*Political Motivation*).

Perusahaan besar dan *industry strategic* akan menjadi perusahaan monopoli. Dengan demikian, perusahaan melakukan manajemen laba untuk menurunkan *visibility*-nya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan.

4. Motivasi Pajak (*Taxation Motivation*).

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

5. Pergantian CEO (*Chief Executif Officier*).

Motivasi manajemen laba akan ada di sekitar waktu pergantian CEO. CEO yang akan diganti melakukan pendekatan strategi dengan cara memaksimalkan laba supaya kinerjanya dinilai baik.

6. *Initial Public Offering* (IPO).

Perusahaan yang pertama kali akan *go public* belum memiliki nilai pasar. Oleh karena itu, manajemen akan melakukan manajemen laba pada laporan keuangannya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

7. Pemberian Informasi kepada Investor (*Communicate Information to Investors*).

Manajemen melakukan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat lebih baik. Hal ini dikarenakan kecenderungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

investor untuk melihat laporan keuangan dalam menilai suatu perusahaan. Pada umumnya investor lebih tertarik pada kinerja keuangan perusahaan di masa datang dan akan menggunakan laba yang dilaporkan pada saat ini untuk meninjau kembali kemungkinan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.1.3.3 Teknik Manajemen Laba

Teknik untuk merekayasa laba dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Setiowati, 2007 dalam Aditama dan Purwaningsih : 2014) yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, memperlambat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

2.1.3.4 Tindakan Manajemen Laba

Tindakan manajemen laba dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Beberapa pola yang dilakukan manajer dalam manajemen laba adalah (Scott, 2003 dalam Amanda dan Febrianti : 2015) :

1. *Taking a Bath.*

Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui adanya biaya pada periode mendatang dan kerugian periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen melakukan pembersihan diri dengan membebaskan perkiraan-perkiraan mendatang dan mengakibatkan laba periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya.

2. *Income Increasing.*

Manajemen laba dilakukan manajemen pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapatkan perhatian oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Income Maximization.*

Income Maximization (maksimalisasi laba) dilakukan supaya kinerja perusahaan terlihat baik. Manajemen laba jenis ini biasanya terjadi pada perusahaan yang menentukan kompensasi manajemen berdasarkan laba yang dihasilkan, perusahaan yang sedang menghadapi kesepakatan kontrak hutang atau kredit dan perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana (IPO).

4. *Income Smoothing.*

Income smoothing (perataan laba) merupakan bentuk manajemen laba yang paling populer dan sering dilakukan karena lewat perataan laba manajemen dapat menaikkan dan menurunkan laba. Manajemen melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba sehingga perusahaan terlihat lebih stabil dan tidak beresiko tinggi. Dengan kondisi perusahaan yang terlihat stabil akan menyebabkan investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

2.1.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

2.1.4.1 Defenisi Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan. Lumbantoruan (1996:483) dalam Sumomba (2010) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen (Aditama dan Purwaningsih, 2014).

Lumbantoruan (1996 : 489) dalam Aditama dan Purwaningsih menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu :

1. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
2. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
3. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.

5. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

2.1.4.2 Motivasi Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2011: 9) ada beberapa hal yang memotivasi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal :

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan

Makin rumit peraturan perpajakan yang ada, maka terdapat kecenderungan untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang terutang

Makin besar jumlah pajak yang terutang akan makin giat usaha-usaha wajib pajak untuk memperkecil jumlah pembayaran pajaknya. Perlu diperhatikan pula bahwa tarif pajak di Indonesia bersifat progresif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Biaya untuk negosiasi

Disengaja atau tidak disengaja, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosiasi-negosiasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.

4. Resiko deteksi

Resiko deteksi berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak.

2.1.4.3 Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah sebagai berikut (Pohan, 2011: 11) :

1. Meminimalisir beban pajak yang terutang.

Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

2. Memaksimumkan laba setelah pajak,

3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus,

4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien dan efektif dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hokum kurungan atau penjara.

- b. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.1.4.4 Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat yang bias diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat adalah (Pohan, 2011: 11) :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.1.5 Beban Pajak Tangguhan (*Deffered Tax Expense*)

Pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasi pada periode mendatang menurut PSAK No.46 (IAI, 2015 dalam Febrianto : 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak Pajak Penghasilan (PPH) di masa yang akan datang yang disebabkan adanya perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang (*tax loss carry forward*) yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Perbedaan temporer atau sementara adalah perbedaan yang terjadi secara fiskal karena perbedaan pengakuan waktu dan biaya dalam menghitung laba (Febrianto, 2014).

Menurut Purba (2009) dalam Hakim dan Praptoyo (2015) mengatakan penyebab perbedaan beban pajak penghasilan dengan PPh terhutang dapat dikategorikan menjadi dua kelompok:

1. Perbedaan permanen atau tetap

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak sedangkan menurut komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan antara laba fiskal dengan laba komersial secara permanen.

2. Perbedaan Temporer atau waktu

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang, misalnya :

a. Metode penyusutan yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode penilaian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan rata-rata.
- c. Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk perusahaan pertambangan, *Leasing*, Perbankan dan Asuransi.
- d. Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari menteri perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari Bank Indonesia.

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal selisih dari perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dan laba akuntansi fiskal yang akan menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan menghasilkan beban pajak tangguhan (Hakim dan Praptoyo, 2015).

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Tingkat *leverage* setiap perusahaan akan berbeda-beda. Dalam satu perusahaan pun tingkat *leverage* antar periode satu dengan periode lainnya akan cenderung berbeda (Roskha, 2017).

Menurut Van Horne (2007) dalam Roskha (2017), *leverage* adalah penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan profitabilitas. *Leverage* merupakan pedang bermata dua yang mana jika laba perusahaan dapat diperbesar, dan sebaliknya. Dengan kata lain, penggunaan *leverage* dalam perusahaan bisa

saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total ekuitas (Brigham dan Houston, 2011:331). Menurut Dominick (2005:8) ukuran perusahaan adalah skala ukuran yang dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual (Mettawidya, 2015).

Besar atau kecilnya ukuran perusahaan akan mendorong melakukan praktek manajemen laba. Perusahaan kecil akan menaikkan jumlah labanya untuk menarik investor dalam menanamkan modal sehingga perusahaan akan terus berkembang, sedangkan perusahaan yang berukuran besar melakukan praktek manajemen laba untuk menghindari laba yang fluktuasi secara drastis, laba yang merata akan membuat perusahaan tidak mengalami penurunan harga saham, kepercayaan dari pihak investor ataupun dari pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh petugas pajak (Santana dan Wirakesuma, 2016).

2.1.8 Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industry pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja. Istilah ini bias digunakan untuk aktivitas

manusia mulai dari kerajinan tangan sampai ke produksi dengan teknologi tinggi. Namun demikian, istilah ini lebih sering digunakan untuk dunia industry, di mana bahan baku diubah menjadi barang jadi dalam skala besar.

Industri Barang Konsumsi merupakan salah satu bagian dari perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Industri Barang Konsumsi masih menjadi pilihan utama bagi para Investor dalam menginvestasikan dana mereka. Hal itu dikarenakan saham-saham mereka dari perusahaan dalam Industri Barang Konsumsi yang masih menawarkan potensi kenaikan. Dan juga Industri Barang Konsumsi terdiri dari 5 sub sektor, yakni Sub Sektor Makanan dan Minuman, Sub Sektor Rokok, Sub Sektor Farmasi, Sub Sektor Kosmetik Dan Barang Rumah Tangga, dan Sub Sektor Peralatan Rumah Tangga.

Seluruh sub sektor yang ada pada Industri Barang Konsumsi merupakan para produsen dari produk-produk mendasar konsumen, seperti makanan, minuman, obat dan produk-produk rumah tangga. Produk-produk yang dihasilkan tersebut bersifat konsumtif dan disukai orang sehingga para produsen dalam industri ini memiliki tingkat penjualan yang tinggi yang berdampak pada pertumbuhan sektor industri ini.

Indeks manufaktur yang sebagian besar komponen pembentuknya terdiri dari perusahaan yang bergerak di industry barang konsumsi, industry dasar dan aneka industri mengalami kenaikan 9,37%. Perusahaan yang bergerak di industry barang konsumsi sebanyak 31 emiten memiliki bobot 44% dari pembentukan indeks manufaktur, sementara aneka industri (40 emiten) dan industri dasar (44 emiten) masing-masing 27%. Daya tahan sektor manufaktur terutama ditopang sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumer yang tumbuh 28%. Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor konsumer juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka industri dan industri dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur. Kenaikan indeks manufaktur ditengah hantaman sejumlah sentiment negatif kenaikan biaya produksi karena penggerak indeks manufaktur sebagian besar berasal dari emiten consumer yang bersifat diversif, seperti PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) dan PT Unilever Tbk (UNVR). Ketersediaan bahan baku sejumlah emiten manufaktur cukup terjaga sehingga pelemahan nilai tukar rupiah memberi dampak signifikan (Indonesia Finance Today).

2.1.9 Pandangan Islam Tentang Manajemen Laba

Islam adalah agama yang diridhoi dan disempurnakan oleh Allah SWT, artinya Islam bukan hanya agama yang mengatur tentang ibadah saja, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia juga diatur di dalamnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam, dimana semua hal tentang kehidupan dan aturan-aturan *hablum minallah* dan *hablum minannas* diatur di dalamnya.

Begitu juga dengan manajemen laba atau disebut juga dengan teknik merekayasa laba untuk kepentingan spesifik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik saham maupun stakeholder perusahaan. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam memimpin baik itu memimpin negara ataupun perusahaan haruslah dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Shaad ayat 26 yang berbunyi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٨﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa manusia adalah khalifah atau pemimpin di bumi, termasuk dalam hal memimpin perusahaan. Dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dala memimpin harus bersikap adil dan tidak mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu hanya akan menyesatkan kita dari Allah SWT.

Selain itu ayat Al-Qur'an juga melarang untuk memakan harta yang tidak halal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Kecurangan-kecurangan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang bukan merupakan hak dari manajemen. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dibenarkan memakan yang bukan menjadi hak kita, oleh karena itu dalam perusahaan, manajemen haruslah transparan dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan demi kepentingan mereka dan mengorbankan kepentingan dari pemilik modal (Nasution, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktek Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI.	Santana dan Wirakusuma (2016)	Variabel X : Perencanaan Pajak dan Ukuran Perusahaan. Variabel Y : Manajemen Laba.	Regresi linier berganda.	Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
2.	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Perusahaan	Purnama (2017)	Variabel X : <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan. Variabel Y : Manajemen Laba.	Regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul	Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
3.	Manufaktur yang Terdaftar di BEI.				
3.	Pengaruh <i>Leverage, Good Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.	Roskha (2017)	Variabel X : <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan. Variabel Y : Manajemen Laba.	Regresi linier berganda.	<i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
4.	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur yang Bergerak Dalam Bidang <i>Food And Beverages</i> di BEI.	Astutik dan Mildawati (2016)	Variabel X : Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan. Variabel Y : Manajemen Laba.	Regresi linier berganda.	Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
5.	Analisis Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Asimetri Informasi, Dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Lq45 yang Terdaftar di BEI.	Mettawidya (2015)	Variabel X : Ukuran Perusahaan. Variabel Y : Manajemen Laba.	Regresi Linier Berganda.	Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
6.	Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan dan	Hakim dan Praptoyo (2015)	Variabel X : Beban Pajak Tangguhan.	Regresi Linier Berganda.	Beban Pajak Tangguhan berpengaruh

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

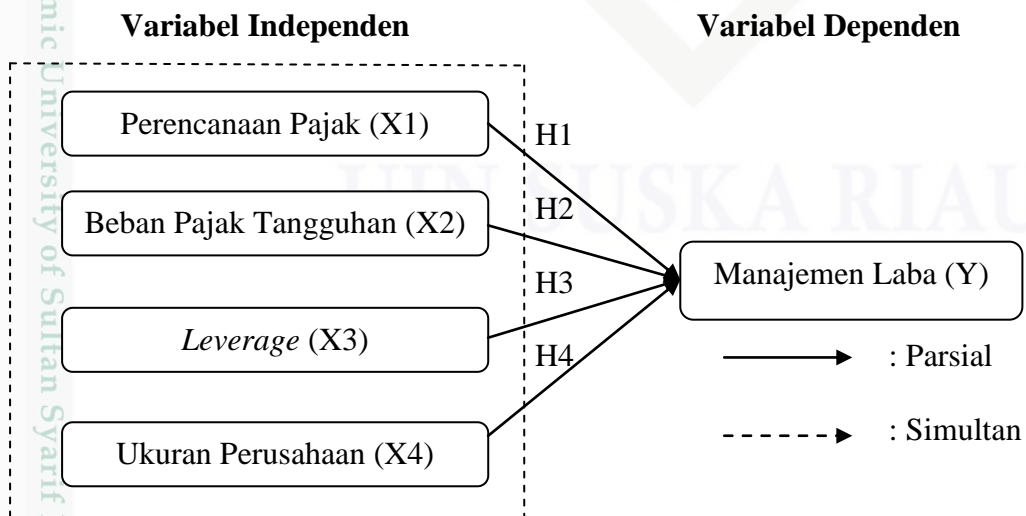
No	Judul	Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.		Variabel Y : Manajemen Laba.		signifikan terhadap Manajemen Laba.
7.	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di BEI.	Aditama dan Purwaningsih (2014)	Variabel X : Perencanaan Pajak. Variabel Y : Manajemen Laba.	Regresi linier berganda.	Perencanaan Pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba.

Sumber : Data telah diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel independen Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan, dan variabel dipendenden dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba.

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Perencanaan Pajak Dengan Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan salah satu insentif pajak yang mempengaruhi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dengan teori keagenan dan teori akuntansi positif. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (*fiskus*) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan (*agent*) berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan. Di lain pihak, pemerintah (*principal*) memerlukan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi agent meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah (Astutik dan Mildawati, 2016).

Pada teori akuntansi positif dalam hipotesis ketiga yaitu *The Political Cost Hypothesis* (Scott, 2003) juga menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung misal: melakukan pergeseran pajak, dengan mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya, melakukan kapitalisasi, dengan melakukan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kemudian oleh pembeli. Merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Astutik dan Mildawati, 2016).

Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Astutik dan Mildawati, 2016).

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. (Aditama dan Purwaningsih, 2013).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian Aditama dan Purwaningsih (2014) berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.4.2 Beban Pajak Tangguhan Dengan Manajemen Laba

Pajak tangguhan dapat dipahami sebagai akibat dari perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dengan sisa kerugian perusahaan (PSAK 46). Dalam kaitannya dengan manajemen laba, perusahaan memiliki kecenderungan untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam rangka penundaan pajak (Setyawan dan Harnovinsah, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Philips, Pincus & Rego (2003) dalam Setyawan dan Harnovinsah (2015) menganalisis penggunaan beban pajak tangguhan dalam mengidentifikasi manajemen laba yang dilakukan untuk mencapai tiga tujuan pelaporan laba, yaitu menghindari kerugian, menghindari penurunan laba dan menghindari kegagalan memenuhi prediksi laba oleh analis, dan terbukti bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba.

Hakim dan Praptoyo (2015) menggunakan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba dan terbukti beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Astutik dan Mildawati (2016) juga menggunakan beban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba dimana hasilnya juga terbukti beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri makanan dan minuman di Bursa efek Indonesia. Hasil ini mencerminkan setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Perbedaan temporer muncul dari komponen akrual dan arus kas operasi. Karena adanya perbedaan temporer itulah beban pajak tangguhan berpengaruh dalam usaha untuk mendeteksi pengaruh rekayasa akrual untuk meminimalkan pajak dalam manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis kedua ini adalah sebagai berikut :

H2 : Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.3 Leverage Dengan Manajemen Laba

Besar atau kecilnya hutang dari perusahaan yang dinilai dari jumlah aktiva perusahaan akan dapat mempengaruhi *earning management*. Tingkat *leverage* yang rendah atau tinggi dipengaruhi oleh pihak manajemen sendiri dalam mengelola tingkat hutang dari perusahaan tersebut. Dan pihak manajemen harus bisa mengelola tingkat hutang tersebut dengan cermat sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah diatur agar perusahaan tidak mengalami *default*. Perusahaan akan berusaha menghindari hal tersebut dengan membuat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Sesuai dengan hipotesis yang melandasi manajemen laba itu sendiri yaitu *debt covenant hypothesis* dimana perusahaan yang memiliki kontrak hutang dan melanggar kontrak tersebut maka kecenderungan pihak manajemen dalam memilih prosedur akuntansi dengan memindahkan laba periode yang akan datang ke periode sekarang (Watts & Zimmerman, 1986 dalam Wijaya dan Christiawan: 2014).

Penelitian Roskha (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur. Sedangkan penelitian Purnama (2017) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa bahwa semakin tinggi atau rendahnya *leverage* tidak akan mempengaruhi manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis yang dapat diajukan :

H3 : Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba

Terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan manajemen laba. Hal ini didukung dengan hipotesis biaya politik, dimana semakin besar suatu perusahaan akan dikenakan biaya politik dan pajak yang dibayar besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan tersebut dipandang memiliki kemampuan lebih besar untuk dibebani biaya yang lebih tinggi. Untuk mengurangi biaya politik dan pajak yang harus dibayar, maka perusahaan akan memilih metode akuntansi yang mengakibatkan laba yang dilaporkan periode sekarang kecil (Mettawidya, 2015).

Pandangan kedua menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang kecil dipandang lebih banyak melakukan manajemen laba daripada perusahaan besar karena perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya. Selain itu, perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh pihak eksternal, sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan (Mettawidya, 2015).

Penelitian Santana dan Wirakesuma (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba. Hal ini berarti bahwa semakin besar perusahaan maka perusahaan akan lebih *credible* dalam menyajikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar akan dipandang lebih kritis oleh pemegang saham dan dari pihak luar.

Sebaliknya Mettawidya (2015) dengan sampel perusahaan LQ 45 menemukan adanya pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar seperti

perusahaan LQ 45 kecenderungan melakukan praktik manajemen laba lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya lebih kecil. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.